

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Undang-Undang No. 17/23, I:1(3)).

Pelaksanaan upaya kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kefarmasian. Salah satu bagian dari pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan sediaan farmasi yang meliputi beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bahan medis habis pakai. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi yang efisien, efektif dan rasional (Wahyuni, Aryzki, Fateriah, 2021).

Perencanaan dan pengendalian merupakan hal yang krusial yang dapat berakibat pada proses manajemen obat yang dapat berakibat buruk seperti terjadinya penumpukan barang, penurunan kualitas, bahkan terjadinya kerusakan barang. Pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan di puskesmas bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan pelayanan obat yang efektif dan efisien untuk menghindari perhitungan

kebutuhan obat yang tidak sesuai, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten dan Kota memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat untuk pelayanan kesehatan untuk menghindari kekosongan obat (Asi, Sakung, Kadri, 2019).

Menurut *World Health Organization (WHO)*, anggaran belanja obat merupakan anggaran terbesar dari total dana kesehatan, dan di negara berkembang biaya obat berkisar 24-66% dari total biaya kesehatan. Belanja obat yang demikian besar tentunya harus dikelola dengan efektif dan efisien. Apabila terjadi kesalahan pada satu tahap akibatnya akan mengacaukan siklus secara keseluruhan yang menimbulkan dampak seperti pemborosan, tidak tersedianya obat, tidak tersalurnya obat, obat rusak, dan lain sebagainya (Sasongko dan Octadevi, 2016 dalam Cahyani, Ulfa, Angelina, 2020).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 bahwa puskesmas adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Salah satu pelayanan penunjang yang ada di Puskesmas adalah pelayanan farmasi. Hal ini juga menjadi *revenue center* utama bagi puskesmas karena sekitar 90% pelayanan kesehatan memanfaatkan perbekalan farmasi yang meliputi obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, bahan alat kesehatan, alat kedokteran dan gas medik (Embrey *et al*, 2018 dalam Sariah dkk, 2022).

Permasalahan yang sering terjadi di puskesmas adalah ketersediaan obat. Obat merupakan suatu komponen esensial yang harus tersedia di sarana pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, obat merupakan bagian hubungan antara pasien dan sarana pelayanan kesehatan, karena ketersediaan obat sebagai indikator utama dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang efisien dan berkualitas aksesibilitas obat yang mudah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, hal ini

akan memperkuat sistem pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut (Lestari, Aprilia, Dyahariesti, 2022).

Perputaran persediaan merupakan permasalahan yang dapat terjadi di puskesmas. Permasalahan ini berhubungan dengan tingkat keefektifan fasilitas dalam mengelola persediaan yang dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP). *Turn Over Ratio* ialah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perputaran modal dalam satu tahun yang menunjukkan seberapa cepat persediaan obat dibeli, dijual, dan digantikan. Nilai TOR yang rendah menunjukkan bahwa persediaan di puskesmas sangat tinggi (Lestari, Aprilia, Dyahariesti, 2022).

Berdasarkan penelitian tentang evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas Terminal di Kota Banjarmasin pada bagian persentase ketepatan perencanaan yaitu 68%. Nilai ini belum mencapai standar yang ditetapkan Kemenkes dan JICA yaitu 100%. Kesesuaian obat dengan DOEN 2021 yaitu 58% yang artinya belum mencapai standar yang ditetapkan Kemenkes dan JICA yaitu 100% dan untuk persentase obat yang kadaluwarsa atau rusak yaitu 4% yang artinya melebihi standar yang ditetapkan yaitu melebihi 0% (Sariah dkk, 2022).

Berdasarkan Penelitian tentang sistem pengelolaan obat di Puskesmas Palapa pada bagian persentase kesesuaian item yang tersedia tahun 2020 dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2019 hasil tidak sesuai standar DOEN 2019 yaitu 67,7%, persentase rata-rata waktu kekosongan obat yaitu 24,6% yang artinya melebihi standar yang ditetapkan yaitu 0% (Aalim, 2021).

Berdasarkan penelitian tentang analisis pengelolaan obat di Puskesmas Cibalong Kecamatan Cibalong tahun 2022 pada bagian persentase perencanaan dan persentase pengendalian yaitu sebesar 60% yang artinya nilai ini belum mencapai standar yang telah ditetapkan (Subagya, Bachtiar, Rahmawati, 2023).

Puskesmas Panjang merupakan salah satu puskesmas yang berada di Bandar Lampung. Berdasarkan proses wawancara awal yang dilakukan menunjukkan bahwa di puskesmas panjang belum dilakukan penelitian

terkait pengelolaan obat. Sementara itu, terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan obat yaitu terjadinya kekosongan obat serta mengalami kerusakan obat serta obat yang sudah kadaluwarsa.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi perencanaan dan pengendalian sediaan farmasi, jika pada tahap ini mengalami kelemahan akan berpotensi mengalami kerugian yang besar pada Puskesmas Rawat Jalan Panjang Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas perlu diteliti karena jika pada tahap perencanaan dan pengendalian tidak efisien menyebabkan tingkat kesesuaian sediaan farmasi, ketepatan perencanaan sediaan farmasi, serta banyaknya sediaan farmasi yang menumpuk, kadaluwarsa dan rusak yang mengalami kerugian akibat perencanaan dan pengendalian yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian sediaan farmasi yang benar, efektif dan efisien. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian Evaluasi Pengelolaan Sediaan Farmasi Pada Salah Satu Puskesmas Rawat Inap Panjang di Kota Bandar Lampung

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian Sediaan Farmasi di Puskesmas Rawat Inap Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2023

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase kesesuaian jenis dan jumlah sediaan farmasi dengan DOEN 2021
- b. Mengetahui persentase ketepatan perencanaan sediaan farmasi di Puskesmas Rawat Inap Panjang
- c. Mengetahui persentase sediaan farmasi rusak atau kadaluwarsa di Puskesmas Rawat Inap Panjang
- d. Mengetahui rata-rata waktu kekosongan sediaan farmasi di Puskesmas Rawat Inap Panjang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti mengenai evaluasi perencanaan dan pengendalian sediaan farmasi di Puskesmas.

2. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Puskesmas Rawat Inap Panjang di Kota Bandar Lampung dalam rangka mengambil kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien khususnya dibidang farmasi dalam pengelolaan obat.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi perpustakaan dan pengetahuan bagi mahasiswa Poltekkes Tanjungkarang Jurusan Farmasi tentang evaluasi perencanaan dan pengendalian sediaan farmasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini untuk evaluasi perencanaan dan pengendalian sediaan farmasi di Puskesmas Rawat Inap Panjang di Kota Bandar Lampung berdasarkan persentase kesesuaian jenis dan jumlah sediaan farmasi dengan DOEN 2021, ketepatan perencanaan sediaan farmasi, persentase sediaan farmasi rusak atau kadaluwarsa, dan rata-rata waktu kekosongan sediaan farmasi pada tahun 2023.